



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR : 09 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lahat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
- (2) Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi Pemerintah.

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 01 - 02 - 2017

BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat

Pada Tanggal 01 - 02 - 2017

H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR : 09

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN LAHAT**

Lampiran : Peraturan Bupati Lahat
Nomor : 9 Tahun 2017
Tanggal : 01 - 02 - 2017

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	Sumber Data	
1	1.1.1 Meningkatkan Pelayanan Prima bagi masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Rumah Sakit Umum Daerah	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Kepmenpan nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004; Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Rumah Sakit Umum Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Dukcapil
		2	Lama Rata-rata Hari Pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Hari Pelayanan	Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Opini BPK atas LKPD	Dinas Badan Keuangan Daerah; Inspektorat	WDP/WTP	Data Badan Keuangan Daerah; Data Inspektorat
		2	Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Setda, Bagian Organisasi	AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 – 85, B (baik) dengan skor 65-75, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.	Permenpan nomor : 12 tahun 2015; Hasil penilaian SAKIP Kab. Lahat
2	2.1.1 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP / MTs / Pk .B}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Siswa SMA / MA / SMK / Pk .C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \times 100$	Data Dinas Dukcapil; Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Aplikasi Dapodik)
		- APM SD/MI/Paket A				
		- APM SMP/MTS/Paket B				
- APM SMA/SMK/MA/Paket C						

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	Sumber Data
		3 Angka Melek Huruf Latin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia >15 tahun Bisa Baca Tulis Latin}}{\text{Jumlah Penduduk >15 tahun Bisa Baca Tulis Latin}} \times 100$	Data Dinas Dukcapil; Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPS
		4 Angka Kelulusan - Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs - Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMA/MA/SMK}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$	Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Laporan dari Sekolah-sekolah
		5 Angka Melanjutkan (AM): - Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs - Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/MA/SMK}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$ * Jumlah siswa baru tingkat I menunjukkan jumlah siswa baru dalam lingkungan Kabupaten Lahat	Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Laporan dari Sekolah-sekolah
		6 Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) - SD/MI - SMP/MTs/SMPT - SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Nilai Rata-rata UN Siswa Tingkat SD/MI}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta UN Siswa Tingkat SD/MI}}$ $\frac{\text{Jumlah Nilai Rata-rata UN Siswa Tingkat SMP/MTs/SMPT}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta UN Siswa Tingkat SMP/MTs/SMPT}}$ $\frac{\text{Jumlah Nilai Rata-rata UN Siswa Tingkat SMA/MA/SMK}}{\text{Jumlah Seluruh Peserta UN Siswa Tingkat SMA/MA/SMK}}$	Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Aplikasi Dapodik) dan Laporan dari Sekolah-sekolah
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Umur Harapan Hidup (UHH)	Dinas Kesehatan	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Data Dinas Kesehatan
		2 Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{jumlah kematian ibu melahirkan di tahun } n}{\text{jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	Data Dinas Kesehatan
		3 Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{jumlah kematian bayi dalam satu tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$	Data Dinas Kesehatan
		4 Persentase Balita Gizi Kurang	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{jumlah balita gizi kurang}}{\text{jumlah balita}} \times 100$	Data Dinas Kesehatan

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	Sumber Data
		5 Annual Parasit Incidence (API)	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Positif Malaria (dengan Pemeriksaan Sediaan Darah)} \times 1000}{\text{Jumlah Penduduk Beresiko pada kurun Waktu yang Sama}}$	Data Dinas Kesehatan
2.2.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1 Persentase Penduduk Miskin	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100$	Data Dinas Sosial; BPS
		2 Persentase Penurunan PMKS	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS (tahun berjalan - tahun 2014)} \times 100 \%}{\text{Jumlah PMKS pada tahun 2014}}$	Data Dinas Sosial; BPS
2.2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 tahun)}} \times 100 \%$	Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; BPS
		2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 tahun)}} \times 100 \% \times 100 \%$	Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; BPS
2.2.3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	1 Persentase Penurunan Kasus Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang ada}} \times 100 \%$	Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Polres Lahat; LP3A
		2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; BPS
		3 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan di lembaga legislatif}}{\text{Jumlah seluruh lembaga legislatif}} \times 100$	Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; BPS
3	3.1.1 Meningkatkan Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan	1 Produksi Tanaman Pangan: - Produksi Tanaman Padi - Produksi Tanaman Jagung - Produksi Tanaman Kedelai	Data Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Padi Jumlah Produksi Tanaman Jagung Jumlah Produksi Tanaman Kedelai	Data Dinas Pertanian
		2 Produksi Peternakan: - Produksi Daging - Produksi Telur	Data Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Daging Jumlah Produksi Telur	Data Dinas Pertanian
		3 Produksi Perikanan: - Produksi Perikanan Budidaya - Produksi Perikanan Tangkap	Data Dinas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Data Dinas Perikanan

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	Sumber Data
		4 - Produksi Perkebunan Rakyat - Produksi Kopi - Produksi Karet - Produksi Kelapa Sawit - Produksi Kakao	Data Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Kopi Jumlah Produksi Karet Jumlah Produksi Kelapa Sawit Jumlah Produksi Kakao	Data Dinas Pertanian
3.1.2	Meningkatnya Usaha Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 Persentase Koperasi yang Berprestasi	Dinas Koperasi dan UKM	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Berprestasi}}{\text{Jumlah Koperasi yang Ada}} \times 100\%$ * Koperasi yang berprestasi yaitu koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek : organisasi, tata laksana, produktivitas, manfaat dan dampak koperasi.	Data Dinas Koperasi dan UKM
		2 Persentase UKM Aktif	Dinas Koperasi dan UKM	$\frac{\text{Jumlah UKM aktif}}{\text{Jumlah UKM yang ada}} \times 100\%$ * Dimaksud UKM aktif yaitu UKM yang aktifitas kegiatannya (jual beli) masih terus berjalan	Data Dinas Koperasi dan UKM
		3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Data Dinas Perdagangan
3.2.1	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup	1 Tingkat Pencemaran Perairan Umum (Sungai)	Dinas Lingkungan Hidup	< Baku Mutu Parameter yang dianalisa : DO, CHL, TDS, Salinitas, pH, Temperatur	Data Dinas Lingkungan Hidup (Uji Laboratorium)
3.3.1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perdesaan	1 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	Dinas PU dan Tata Ruang	Jumlah Panjang jalan kabupaten kondisi baik	Data Dinas PU dan Penataan Ruang
		2 Rasio Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Dinas PU dan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang dibangun}}{\text{Jumlah total irigasi yang dibangun}} \times 100\%$	Data Dinas PU dan Penataan Ruang
3.3.2	Meningkatnya Sektor Kepariwisata	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Data Dinas Pariwisata

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

MAPPING KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014-2019

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	satuan	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
1	Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis, Berkeadilan dan Akuntabel	1.1 Meningkatkan Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dalam Penyusunan Kebijakan, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1.1.1 Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Rumah Sakti Umum Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Dukung	
				2 Lama rata-rata Hari Pelayanan	14	14	14	14	14	14	hari kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			1.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP		Badan Keuangan Daerah; Inspektoral	
				2 Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	C	CC	CC	CC	B	B		Sekda; Bagian Organisasi	
2	Mewujudkan Masyarakat Madani (Produktif, Mandiri, Bermoral, Beretika dan Berwawasan Lingkungan)	2.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	2.1.1 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat	1 Angka Partisipasi Kasar (APK)								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				- APK SMP/MTs/Paket B	97,27	97,39	97,83	98,26	98,7	99,13	persen		
				- APK SMA/MA/SMK/Paket C	88,1	93,16	98,93	99,47	99,47	100	persen		
				2 Angka Partisipasi Murni (APM)									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				- APM SD/MI/Paket A	90,80	90,63	92,09	92,24	96,77	97,2	persen		
				- APM SMP/MTs/Paket B	63,20	63,67	64,68	65,85	67,63	69,05	persen		
				- APM SMA/SMK/MA/Paket C	63,00	63,17	64,17	66,49	68,78	71,05	persen		
				3 Angka Melek Huruf Latin	98,89	98,98	98,96	99,01	99,07	99,12	persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4 Angka Kelulusan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				- Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	persen		
				- Angka Kelulusan SMP/MTs	99,93	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	persen		
				- Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	persen		
				5 Angka Melanjutkan (AM):									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	81,90	82,86	94,69	96,69	100,00	100,00	persen						
- Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA	99,20	98,56	97,00	100,20	95,51	99,33	persen						

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	satuan	SKPD PELANGGUNG JAWAB
				8. Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) - SD/MI - SMP/MTs/SMPT - SMA/MA/SMK				65,00 65,00 65,00	65,00 65,00 65,00	65,00 65,00 65,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Umur Harapan Hidup (UHH)	67	68	68,5	69	69,5	70	Tahun	Dinas Kesehatan
				2. Angka Kematian Ibu (AKI)	154,67	61,60	61,60	61,60	61,60	61,60	persen	Dinas Kesehatan
				3. Angka Kematian Bayi	< 24	< 24	< 24	< 24	< 24	< 24	persen	Dinas Kesehatan
				4. Persentase Balita Gizi Kurang	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	persen	Dinas Kesehatan
				5. Annual Parasit Incidence (API)	3	3	3	2	1	1		
		2.2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.2.1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Penduduk Miskin	18,61	16,29	15,74	15,20	14,68	14,18	persen	Dinas Sosial
				2. Persentase Penurunan PMKS	-	-	89,44	85,64	75,00	70,00	persen	Dinas Sosial
			2.2.2. Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,76	3,67	3,37	2,78	2,10	1,36	persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,14	70,14	74,35	78,81	83,54	88,55	persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2.2.3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Serta Kesetaraan Gender	1. Persentase Penurunan Kasus Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	10	10	10	10	10	10	persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	0,65	17	26	26,2	26,6	28,3	persen	
				3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	persen	
3	Mewujudkan Tatanan Ekonomi yang Tangguh	3.1. Meningkatkan Sektor Pangan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.1.1. Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan	1. Produksi Tanaman Pangan - Produksi Tanaman Padi - Produksi Tanaman Jagung - Produksi Tanaman Kedelai	153.555 2.229,57 1.229,12	153.000 980 2.156	153.000 1.000 2.200	156.060 1.020 2.244	159.181 1.040 2.288	162.364 1.060 2.333	ton ton ton	Dinas Pertanian
				2. Produksi Peternakan - Produksi Daging - Produksi Telur	2.280 2.126	2.353 2.232	2.471 2.244	2.795 2.264	3.624 2.388	4.761 2.418	ton ton	Dinas Pertanian

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	satuan	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				3 Produksi Perikanan									
				- Produksi Perikanan Budidaya	3.215	3.858	4.635	5.562	6.674	8.009	ton	Dinas Perikanan	
				- Produksi Perikanan Tangkap	1.192	1.430	1.716	2.059	2.471	2.965	ton		
				4 Produksi Perkebunan Rakyat									
				- Produksi Kopi	19.691	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800	ton	Dinas Pertanian	
				- Produksi Karet	44.339	49.200	49.400	49.600	49.800	50.000	ton		
				- Produksi Kelapa Sawit	71.738	68.200	68.700	69.200	69.700	70.200	ton		
				- Produksi Kakao	1.907	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100	ton		
		3.1.2	Meningkatnya Usaha Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 Persentase Koperasi yang Berprestasi	17,46	18,36	19,33	20,35	21,25	22,33	persen	Dinas Koperasi dan UKM	
				2 Persentase UKM aktif	99,32	99,53	99,54	99,87	100	100	persen	Dinas Koperasi dan UKM	
				3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,19	10,38	10,41	10,43	10,44	10,50	persen	Dinas Perdagangan	
		3.2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3.2.1	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup				< Baku Mutu	< Baku Mutu	< Baku Mutu		Dinas Lingkungan Hidup
		3.3	Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Infrastruktur	3.3.1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Perdesaan								
				1 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	90,61	147	125,41	156,75	106,75	110,5	km	Dinas PU dan Penataan Ruang	
				2 Rasio Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	50	17,8	19,6	22,97	20,27	19,59	persen	Dinas PU dan Penataan Ruang	
		3.3.2	Meningkatnya Sektor Kepariwisata	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	22.253	50.000	50.000	50.100	50.100	50.150	orang	Dinas Pariwisata	

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I